

# TUMBUHNYA NASIONALISME DI GORONTALO SEBUAH PENCITRAAN HISTORIOGRAFI

**Joni Apriyanto**

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

**Abstrak:** dari sejarah masa penjajahan, kita mengetahui bahwa negasi status serta peran bangsa Indonesia khususnya Gorontalo karena politik diskriminasi, eksploitasi, serta dominasi oleh penguasa kolonial, mengingkari identitas rakyat Gorontalo sebagai kesatuan bangsa Indonesia. Lewat pergerakan nasional para perintis kemerdekaan mampu menemukan kembali serta merumuskan identitas nasional bersama dengan ideologi nasionalismenya. Prinsip-prinsip nasionalismelah yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Gorontalo, yang memacu kapasitas serta potensi sebagai suatu bangsa untuk berkembang dan merealisasikan tujuan kolektif. Abad XX adalah abad nasionalisme, artinya sejak awal sampai dengan penutupan abad ini timbul kesadaran berbangsa. Hal ini dapat dilihat dari kesadaran rakyat Gorontalo untuk merdeka sudah mengawali abad ini yang menginginkan terciptanya *nation* sendiri yang merdeka, yang terakhir ini ternyata baru berlangsung menjelang penutupan abad XX. Jelas kiranya bahwa keinginan bersama untuk membebaskan diri dari dominasi etnik lain (kolonial Belanda) terjadi secara universal.

**Kata kunci:** nasionalisme, Gorontalo, pencitraan, dan historiografi.

## **Pendahuluan**

Pencitraan sejarah lokal Gorontalo dari sudut pandang akademik, sejarah kritis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan historiografi yang telah mengalami tiga *revolusi metodologinya*. *Pertama*, sewaktu Mabillon menciptakan ilmu diplomatik yang menuntut penelaahan dokumen secara kritis sebelum dipakai sebagai sumber sejarah; *kedua*, Leopold von Ranke melengkapi kritik ekstern dan intern dengan seleksi kritis data sejarah dalam menetapkan fakta berdasarkan pedoman *wie es eigentlich gewesen (ist)*, sebagaimana sesungguhnya terjadi. *Ketiga*, dalam abad ke-20 muncullah *revolusi metodologi ketiga*, yang lazim lebih dikenal sebagai sejarah dengan pendekatan ilmu sosial. Studi sejarah di Indonesia pada fase pertumbuhan awal sampai dengan saat ini telah memakai

metodologi itu, hal itu bukan karena masalah mode, namun berdasarkan alasan bahwa relevansinya sangat besar terutama dalam rangka penyusunan sejarah nasional yang mampu menggambarkan segala aspek kehidupan bangsa. Sejarah Gorontalo dalam berbagai pendekatan interdisiplin dalam kenyataannya relatif belum digarap dan diperbincangkan ditengah perjalanan sejarah bangsa dan perkembangan historiografi Indonesia.

Berdasarkan hasil studi dan penelitian penulis ditemukan relatif banyak sumber-sumber tertulis dari awal abad ke-16 sampai abad ke-20, baik sumber dalam bentuk manuskrip dan mikrofilm. Sumber tersebut masih berupa penggalan-penggalan peristiwa, yang dapat ditemui di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jakarta. *Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde* (KITLV), *Algemeen Rijksarchief* (ARA): Arsip Umum (Nasional) kerajaan Belanda di Den Haag, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta bahkan di Daerah Istimewa Yogyakarta terutama di Keraton Ngayogyakarta dan di beberapa daerah lain seperti di Manado maupun di Ternate. Persoalannya sekarang, sejauhmana intensitas dan kepedulian atau apresiasi kita terhadap hal itu, sehingga sumber-sumber yang dimaksud mampu berbicara kepada kita bahwa Gorontalo mempunyai sejarah, yang juga harus dapat diperhitungkan dalam pergumulan perkembangan sejarah Indonesia sepanjang abad. Rekonstruksi historiografi Gorontalo, untuk melihat seberapa jauh keterkaitan peristiwa-peristiwa di tingkat lokal dengan peristiwa yang lebih luas, Nasional maupun Internasional menjadi sebuah tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi sebagai wujud dari pencarian identitas bangsa dalam kerangka satu kesatuan yang utuh dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Ketidakseimbangan penulisan sejarah lokal Gorontalo dibandingkan dengan penulisan sejarah daerah-daerah lain di wilayah yurisdiksi Indonesia dalam konteks *eksplanasi* sejarah nasional Indonesia, memang menurut hemat penulis dirasa tidak adil, arif, dan bijaksana jika peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dan menyejarah di spasioal Gorontalo ini tidak dimasukkan sebagai bagian dari rekonstruksi sejarah nasional Indonesia. Disisi yang lain, ataukah memang kita sendiri yang bersikap tidak *apresiatif*, atau *antipati*, dan tidak *respect* terhadap jejak-jejak masa lampau sebagai *civilization foundation Gorontalo* dan kemudian membangun komitmen mencarikan jalan keluar mengenai persoalan hal itu. Sungguh persoalan ini menjadi dilematis dan menggelitik hati dan intelektualitas kita semua. Secara faktual, dibeberapa buku sejarah nasional kita, apalagi dimasukkan didalam kurikulum nasional pada setiap jenjang pendidikan praktis tidak ada, walaupun ada hanya sebatas muatan lokal sebagai konsumsi kita dan daerah

sendiri yang notabene secara metodologis sejarah belum memenuhi persyaratan dan *anakronisme*.

Penulisan sejarah Gorontalo ke arah penulisan sejarah kritis sangatlah diperlukan dan menjadi sebuah tuntutan bagi generasi saat ini dan akan datang, sehingga tidak terjebak pada area cerita yang satu ke cerita lainnya atau sekedar informasi dari “mulut ke mulut”, tanpa didasarkan oleh data yang dikritik menjadi fakta atau *evidensi* sejarah. Singkatnya, tidak semua peristiwa ataupun tulisan dapat dikategorikan fakta sejarah. Fakta ibarat bahan bangunan bagi para sejarawan oleh karena itu sangat penting. Fakta dapat berupa objek benda, individu, peristiwa dari masa lalu. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, kapan, dan dimana merupakan fakta-fakta, akan tetapi jawaban-jawaban faktual itu belum merupakan fakta sejarah melainkan masih berupa *kronik* saja. Agar mempunyai makna, fakta harus ditempatkan dalam konsep dan generalisasi. Rekonstruksi sejarah adalah tulisan yang syarat akan *roh kebenaran* karena penulisan sejarah berdasarkan fakta-fakta, sesuai perkembangan zamannya. Seperti ucapan Cicero (106-43 SM), “*primam esse historiae legem ne quid falsi dicere audeat, ne quid veri non audeat*: hukum pertama dalam sejarah ialah takut mengatakan kebohongan, hukum berikutnya tidak takut mengatakan kebenaran”. Sejarah mempunyai nilai kebenaran, bersifat dinamis, dan tidak statis. Disinilah fungsi dan pentingnya teoretis untuk mempertajam analisis untuk menemukan *benang merah* proseskausalitas antara fakta peristiwa dengan fakta peristiwa lainnya. Tanpa itu, rekonstruksi peristiwa-peristiwa yang bersejarah menjadi hampa, tak bermakna.

Suatu peristiwa harus diterangkan secara lebih jauh dan lebih mendalam mengenai bagaimana terjadinya, latarbelakang kondisi sosial, ekonomis, politik, dan kulturalnya. Perlu diakui bahwa hanya menceritakan bagaimana terjadinya suatu peristiwa belum memberikan *eksplanasi* secara tuntas dan lengkap. Di sini kita memperoleh dasar legitimasi mengapa dalam studi sejarah diperlukan metodologi dan teori.

Pentingnya rekonstruksi sejarah Gorontalo sebagai tuntutan menjadi bagian dari perkembangan sejarah di Indonesia sejak pertengahan abad ini, amat dipengaruhi oleh dua jenis pengaruh; yang pertama ialah proses *nation building* yang menuntut suatu rekonstruksi sejarah sebagai sejarah nasional yang akan mewujudkan kristalisasi identitas bangsa Indonesia; yang kedua ialah membudayakan sejarah Gorontalo dalam masyarakat Indonesia yang menuntut pertumbuhan pesat, tidak hanya mengejar keterbelakangan melainkan juga meningkatkannya dengan menempatkannya sejajar dengan tingkat perkembangan di luar.

Tuntutan pertama, membutuhkan pendekatan yang mampu menciptakan rekonstruksi sejarah Gorontalo yang komprehensif serta mencakup pelbagai dimensinya. Disini perlunya pendekatan ilmu sosial akan memadai. Tuntutan kedua, secara logis membawa implikasi bahwa kecendrungan kuat yang dominan di dunia Barat tidak lain ialah sejarah dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial. Apabila kedua tuntutan sekaligus dapat dipenuhi dengan mempergunakan teori sosial dalam studi sejarah, maka perkembangan penulisan sejarah Gorontalo akan secara efektif dan produktif mendukung proses *nation building* di satu pihak dan di pihak lain menempatkan diri sekaligus sejajar dengan historiografi internasional.

Dalam rangka pembangunan bangsa peranan sejarah, khususnya historiografi Gorontalo amat penting, terutama untuk membangkitkan kesadaran sejarah sebagai landasan kesadaran nasional, maka penulisan sejarah Gorontalo dalam konteks studi sejarah kritis berfungsi sangat fundamental dalam mengubah mitos tentang masa lampau menjadi gambaran empiris-rasional tentang pengalaman kolektif bangsa yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kaidah-kaidah metodologinya.

Banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh masyarakat umum, akademisi, dan dari kalangan pendidik (guru) yang didengar dan ditemukan oleh penulis sekitar mengenai eksistensi sejarah Gorontalo. Pertanyaan itu, berkisar pada fakta jejak masa lampau itu sendiri baik fakta sejarah Gorontalo dari awal abad ke-16 sampai dengan abad ke-20. Pendeknya penulis jawab, ada faktanya dan akurat. Maraknya berbagai pertanyaan itu, menunjukkan bahwa masyarakat kita belum tahu dan memahami secara totalitas mengenai akurasi-autentitas fakta-fakta tersebut, baik *socifact*, *mentifact*, dan *artefact*-nya. Inilah saatnya untuk menyikapi persoalan ini untuk memupuk kritisisme tetapi juga melatihnya untuk "berpikir tentang pikirannya sendiri" dengan perkataan lain, untuk berfilsafat. "Bercermin secara intelektual" secara terus menerus, yang berarti senantiasa mengobjektivikasi buah pikirannya sehingga kita tidak mudah menerima segala sesuatu begitu saja (*taken for granted*), tetapi selalu mampu secara kritis sehingga tidak mudah terjerumus dalam subjektivitas, tidak hanya dalam menggarap sumber sejarah tetapi juga membuat sintesis sebagai bagian dari proses rekonstruksi sejarah. Untuk kemudian hasilnya kita persembahkan kepada masyarakat Gorontalo pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya sebagai wujud pencitraan secara utuh historiografi Gorontalo.

Untuk mewujudkan pencitraan sejarah Gorontalo ke dalam *content* sejarah Nasional (*nation building*) Indonesia dibutuhkan kesungguhan dan keseriusan dari semua pihak terutama masyarakatnya, kalangan

akademisnya, pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif dari tingkat provinsi sampai dengan kabupaten sebagai pengambil kebijakan. Tanpa mengetahui sejarahnya, suatu bangsa tak mungkin mengenal dan memiliki identitasnya. Menumbuhkan kesadaran sejarah (*historical-consciousness*) Gorontalo, berarti kita menghargai peradaban kita sendiri sebagai kesatuan identitas bangsa.

Dalam upaya pencitraan historiografi itu, maka tulisan ini akan mengeksplanasikan spasial Gorontalo pada periode tertentu yakni masa tumbuh dan berkembangnya nasionalisme yang ditandai berdirinya organisasi pergerakan nasional, pers, dan gerakan sastra di Gorontalo sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme. Sudah selayaknya kalau dominasi sosio-politik kolonialisme Belanda itu membangkitkan perlawanan melalui organisasi yang diatur secara modern. Memang organisasi modern itu sebenarnya adalah dampak modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial sendiri. Kebangkitan nasional adalah dampak yang tidak disadari oleh pemerintah, karena itu dengan lahirnya Budi Utomo, Sinar Budi (versi Gorontalo) pihak-pihak yang sehaluan dengan pemerintah merasa keheran-heranan, mengapa organisasi itu lahir padahal sebenarnya kalau diakui kelahirannya merupakan adaptasi dan inovasi yang dilakukan bangsa Indonesia, Gorontalo khususnya untuk menyesuaikan dengan politik kolonial. Guna memperkuat inovasi itu diperlukan lembaga modern untuk mengikat semua kegiatannya di segala bidang, dengan demikian terbentuklah *counter-institution* dalam menghadapi kekuasaan kolonial.

### **Tumbuhnya Nasionalisme: Organisasi Pergerakan Nasional di Gorontalo**

Awal abad ke-20 perkembangan politik Belanda mengalami perubahan arah dan mendasar. Eksploitasi terhadap Indonesia khususnya di Gorontalo sebagai pembenaran utama atas kekuasaannya mulai berkurang dan digantikan dengan pernyataan-pernyataan keprihatinan atas kesejahteraan bangsa Indonesia (Ricklefs, 1995). Perubahan kebijakan tersebut dikenal dengan politik etis yang berdasar pada gagasan kewajiban moral dan hutang budi (*een eereschuld*) pemerintah kolonial terhadap tanah jajahan. Dalam pidato Ratu Wilhelmina pada bulan September 1901 menyatakan bermulanya zaman baru dalam politik kolonial dengan trilogi kebijakan, edukasi, irigasi dan emigrasi (Van Den Bosch, 1941). Periode ini menurut Van Deventer dan para pengikutnya adalah inti dan kunci segala perubahan yang diinginkan. Selanjutnya bagi Van Deventer, tidak akan ada perubahan tanpa tenaga-

tenaga pribumi yang berpendidikan cukup yang akan memikul beban itu (Robert Van Niel,1984).

Seiring dengan hal itu, Gorontalo juga tidak lepas dari *mainstream* tersebut. Kesempatan untuk menikmati pendidikan bagi orang-orang pribumi dalam perkembangannya memberikan peluang kepada orang-orang Gorontalo untuk membentuk kekuatan dan kemudian berseberangan dengan pemerintah kolonial. Penentangan terhadap pemerintah Hindia Belanda dilakukan dengan menyatukan diri lewat berbagai organisasi sosial, agama, dan politik yang didirikannya. Organisasi Sinar Budi (SB), Sarekat Islam (SI), Muhammadiyah, Nahdatussyafiyah, Partai Indonesia (Partindo), Partai Arab Indonesia (PAI), Persatuan Islam (Persis), Partai Tionghoa Indonesia (PTI), Gabungan Politik Indonesia (GAPI), serta beberapa organisasi kepemudaan seperti *Jong Gorontalo*, *Jong Islamiten Bond* (JIB), Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) dan lain-lain merupakan wujud dari rasa nasionalisme rakyat Gorontalo.

Di samping munculnya organisasi-organisasi pergerakan, muncul pula sejumlah surat kabar pribumi dan gerakan kesusasteraan Gorontalo, seperti *tanggomo*. Semua itu merupakan bagian kebangunan penduduk bumiputera di Hindia Belanda. Kaum bumiputera mencari tempat dan bentuk-bentuk untuk menyatakan kesadaran baru, menggerakkan pikiran-pikiran dan gagasan yang dihadapkan kepada realitas di Hindia Belanda di tengah dunia dan zaman yang dirasakan semakin bergerak (Takashi Shiraisi, 1990).

Munculnya surat-surat kabar di Gorontalo seperti *Soeara Nasional*, *Tjahaja Merdeka*, *Sinar Merdeka*, *Soeara Rakjat*, *Kilat*, *Kesatoean*, *Soeara Pemoeda*, *Lukisan Masyarakat*, *Kebenaran*, *Kita*, *Adil*, dan *Insjaf* (Kempen RI, 1953, ANRI) bahkan surat kabar yang diterbitkan orang-orang Tionghoa peranakan di Makassar, misalnya *Chau Sing* yang peredarannya sampai ke Gorontalo turut memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan pengembangan rasa nasionalisme dan juga menciptakan suatu masyarakat yang edukatif.

Di samping itu pers berfungsi untuk mensosialisasikan cita-cita dan perjuangan pergerakan kepada rakyat (F.Rachmadi,1990) pers juga menciptakan sistem komunikasi terbuka dan oleh karenanya informasi dapat diperoleh oleh golongan sosial manapun. Sirkulasi informasi yang terbuka mau tidak mau mengurangi keketatan hirarki menurut usia dan kedudukan, posisi monopolistis golongan yang berstatus tinggi, dan sebagainya (Sartono Kartodirdjo,1990). Hal serupa munculnya gerakan kesusasteraan seperti *tanggomo* menjadi *counter* terhadap sistem kolonial yang diterapkan di tanah jajahan, Gorontalo. Selain itu *tanggomo* merupakan salah satu bukti

terjadinya penyebaran gagasan atau ide-ide pembaharuan mengingat dalam *tanggomo* terdapat nilai-nilai dan fungsi bagi kehidupan masyarakat (Nani Tuloli,1990).

Munculnya nasionalisme yang ditandai adanya organisasi pergerakan baik yang bersifat sosial-agama, politik, munculnya pers, dan gerakan kesusasteraan Gorontalo (*tanggomo*) pada dasarnya merupakan respon terhadap hegemoni Belanda. Faktor-faktor itu dalam perkembangannya menjadi pukulan bagi pemerintah Hindia Belanda.

Dari sisi sistem birokrasi kolonial yang menggantikan sistem birokrasi tradisional ternyata menuntut diadakannya perluasan jabatan-jabatan baru yang mampu mengakomodasi kebutuhan untuk kepentingan pemerintah kolonial, yang pada akhirnya mendorong terjadinya mobilitas sosial dan munculnya elite modern.

Munculnya elite modern di Gorontalo, pada umumnya berasal dari kelompok bangsawan atau paling tidak berasal dari keluarga terpandang dan terhormat di masyarakat. Elite modern di Gorontalo dibedakan menjadi dua bagian yaitu *pertama*, elite penguasa pemerintah atau elite formal. *Kedua*, elite penguasa yang bukan pemerintah atau kelompok pimpinan non formal (Suzanne Keller,1984). Contoh figur yang termasuk kelompok pertama seperti Zakaria Wartabone yang memperoleh kedudukan di masyarakat oleh karena kekuasaan politik yang dimilikinya. Kelompok ini tidak memerlukan massa untuk melaksanakan suatu kebijakan politik, sebab mereka memiliki kekuasaan politik untuk melakukan tindakan yang dipandang bermanfaat bagi masyarakat yang dipimpinnya. Lain halnya dengan kelompok elite bukan pemerintah seperti Nani Wartabone dan R.M Koesno Danoepojo menjadikan massa sebagai instrumen penting untuk memperkuat kedudukannya. Hal itu penting karena kehadiran mereka di masyarakat ditentukan oleh dukungan massa.

Dalam banyak hal kelompok elite bukan pemerintah tidak saja memiliki pengaruh dalam bidang politik, akan tetapi juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial-budaya dari anggota masyarakat yang dipimpinnya. Dari faktor-faktor tersebut, dalam perkembangan berikutnya kelompok elite ini berhasil mengelolah dan memobilisasi massa dari berbagai komponen yang ada untuk mengadakan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Secara faktual pada awal abad ke-20 kelompok elite non pemerintah seperti Nani Wartabone, R.M. Koesno Danoepojo bersama rekan-rekan lainnya berhasil memanfaatkan moment-moment penting untuk menyusun strategi dan kekuatan.

Bertolak dari pandangan Takashi Shiraishi (1990), bahwa nasionalisme tumbuh bertahap dan didukung oleh bentuk kegiatan yang tidak semata-mata dalam wadah organisasi politik. Tulisan di surat kabar dan majalah, demonstrasi dan rapat-rapat, serikat sekerja dan pemogokan, kesusasteraan, kesenian, dan sandiwara merupakan wujud kebangunan penduduk bumiputra di Hindia Belanda. Keseluruhan gerak yang menandai kebangunan kesadaran nasional itu disebut pergerakan.

Nasionalisme adalah sebuah doktrin politik, perasaan atau, pikiran yang didasarkan atas asumsi bahwa masyarakat sebaiknya diorganisasikan dalam bentuk negara-negara (*nation state*) dan negara-negara menjadi titik sentral dari loyalitas individu dan kelompok, (lihat Harry Riter, 1986), sementara itu Carlton J. H. Hayes melukiskan lima bentuk dasar yang didalamnya nasionalisme menyebar dalam berbagai variasi di dunia sejak abad ke delapan belas. Kelima bentuk dasar itu, masing-masing: nasionalisme humanitarian, nasionalisme Jacobin, nasionalisme tradisional, nasionalisme liberal, dan nasionalisme integral. Lebih jauh tentang hal ini, (lihat Carlton J. H. Hayes, 1995).

Keterlibatan kaum intelektual dalam menumbuhkan nasionalisme menjadi kunci sebagai penggerak utama dari berbagai gerakan nasionalis. Seperti yang dikemukakan di depan, implikasi kehadiran intelektual berubah menjadi bumerang bagi sistem kolonial Belanda. Hal tersebut tidak hanya karena mereka telah mengetahui lewat bangku sekolah rahasia kekuatan dan keunggulan Eropa, tetapi juga karena mereka mendapat kenyataan bahwa preferensi hanya diberikan kepada orang-orang Belanda dan Indo-Eropa. Kesadaran tentang kondisi yang mereka alami diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pembentukan organisasi, penerbitan surat kabar, kelompok studi, pemogokan, dan partai politik (Savitri Prastiti Scherer, 1985). Keragaman bentuk perjuangan ini mengalami pertumbuhan yang pesat pada paruh pertama abad ke-20, sehingga awal abad ke-20 dapat dikatakan sebagai babakan baru dalam menentang imperialisme Belanda.

Di Gorontalo seperti halnya daerah lain di Indonesia, kesadaran dari mereka yang telah memperoleh pendidikan untuk memulai suatu babakan baru dalam perjuangan menentang penjajah juga bermunculan, dengan kata lain masyarakat yang telah mengenal dunia pendidikan tidak kaget atas hadirnya berbagai organisasi sosial-keagamaan maupun politik. Sebaliknya mereka dengan cepat merespons kehadiran berbagai lembaga itu. Hal tersebut ditandai dengan berkembangnya berbagai organisasi pergerakan yang dimulai sekitar tahun 1920-an, baik sebagai perluasan dan pengembangan organisasi yang berpusat di Jawa maupun yang muncul di Gorontalo sendiri.



Strategi serta siasat perjuangan melalui organisasi-organisasi tersebut mendapat simpati yang besar dari seluruh masyarakat. Pengaruhnya makin meluas dan segera menyebar di daerah Gorontalo, yang berakibat munculnya berbagai organisasi sosial dan organisasi politik yang mengarah kepada kesatuan langkah dan gerak dalam usaha meningkatkan taraf hidup bangsa.

Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat Gorontalo pada masa itu telah meletakkan “kepentingan nasional” sebagai yang utama. Seperti yang diuraikan dalam salah satu sumber tertulis (A.Hasnan Habib,1994), bahwa kepentingan nasional itu dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar sebagai berikut.

*Pertama*, kepentingan fisik, material, yakni keutuhan wilayah merupakan kepentingan fisik-material yang tertinggi. Tidak sejengkal tanah pun dari wilayah nasional boleh dibiarkan dijamah atau dirampas oleh pihak luar, terlepas dari masalah apakah bagian wilayah itu mempunyai arti strategis atau tidak, berpenduduk atau tidak, yang penting ia adalah bagian dari organik negara. Dalam hal ini reaksi suatu negara atau wilayah tertentu cenderung sama dengan reaksi suatu organisme biologis manakala menghadapi serangan. Keselamatan warga negara serta aset-aset material juga merupakan kepentingan nasional, bahkan juga jika berada di luar wilayah yurisdiksi nasional. Namun gangguan atau serangan terhadap kepentingan nasional yang berada di luar wilayah yurisdiksi nasional, tidak selalu memancing respons kekerasan. Kesejahteraan ekonomi bangsa juga dianggap sebagai kepentingan nasional yang perlu dipertahankan atau diperjuangkan.*Kedua*, kepentingan politik, agama dan ideologi. Hampir sama dengan nilai integritas wilayah adalah nilai kedaulatan dan hak mengatur diri sendiri tanpa campur tangan luar. Agama juga merupakan sumber kekerasan, ironisnya bahkan yang sering tanpa kompromi. *Ketiga*, kepentingan derivatif. Kepentingan derivatif ini merupakan kepentingan-kepentingan lain yang sebenarnya secara rasional tidak terlalu vital untuk menanggung resiko perlawanan. Kepentingan-kepentingan itu, meskipun tidak tergolong kepentingan butir kesatu dan butir kedua di atas, namun bersumber dari padanya. Diantaranya seperti pertimbangan geopolitik, konsep kredibilitas, kehormatan bangsa, kebanggaan nasional, dan berbagai konsepsi psikologis lainnya.

Di Gorontalo kesadaran nasional yang telah meletakkan kepentingan nasional hal yang utama pertama-tama dimotori oleh mereka yang aktif dalam organisasi-organisasi, seperti *Sinar Budi* (SB), *Sarekat Islam* (SI), *Muhammadiyah*, *Nahdatussyafiiyah*, *Partai Indonesia* (Partindo), *Partai Arab Indonesia* (PAI), *Persatuan Islam* (Persis), *Penyedar*, serta gerakan

pemuda antara lain *Jong Gorontalo*, *Jong Islamiten Bond* (JIB), dan *Kepanduan Bangsa Indonesia* (KBI).

Seperti disebutkan di atas, organisasi sosial pertama yang tumbuh atas kesadaran etnis Gorontalo adalah Sinar Budi (SB). Organisasi ini tidak melakukan kegiatan politik, tetapi bermaksud menghimpun seluruh rakyat Gorontalo dalam satu wadah persatuan, walaupun usahanya dalam bidang sosial kurang menampakkan hasil, namun organisasi ini telah menyebar dengan membuka ranting-ranting di wilayah Gorontalo yakni di Marisa dan Bumbulan. Berdirinya Sinar Budi di Gorontalo dipelopori oleh Husain Katili, Saleha Mina, dan Patihedu Monoarfa (ANRI).

Selain Sinar Budi, Sarekat Islam (SI) atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Sarikat* oleh masyarakat Gorontalo. Pada mulanya, organisasi yang didirikan di Laweyan, Surakarta pada bulan November 1912 ini bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Pada tahun 1921 Sarekat Islam (SI) berubah menjadi Partai Sarekat Islam dan pada tahun 1930 berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (Deliar Noer, 1988).

Pendirian ini dilatarbelakangi oleh kompetisi yang meningkat dalam bidang perdagangan batik terutama dengan golongan Cina dan sikap superioritas orang Cina terhadap orang-orang Indonesia sehubungan dengan berhasilnya revolusi Cina dalam tahun 1911 (Deliar Noer, 1988).

Perkembangan organisasi ini pada dasarnya dapat dibagi dalam empat periode. *Pertama*, dari 1911 sampai 1916 yang memberi corak dan bentuk bagi partai tersebut. *Kedua*, dari 1916 sampai 1924 dapat dikatakan periode puncak. *Ketiga*, 1921 sampai 1927, periode konsolidasi. Pada periode inilah Sarekat Islam bersaing keras dengan golongan komunis di samping mengalami tekanan-tekanan dari pemerintah Belanda. *Keempat*, dari tahun 1927 sampai 1942 yang memperlihatkan usahanya untuk tetap hidup di forum politik Indonesia (Deliar Noer, 1988). Dalam pandangan A.P.E. Korver, dari keempat periode perkembangan tersebut, periode pertamalah gerakan ini berjalan sangat dinamis dan mencapai perkembangan yang paling luas (A.P.E. Korver, 1985). Pada periode itu kurang lebih 190 SI cabang telah berdiri di seluruh Indonesia termasuk di Gorontalo.

Sarekat Islam (SI) mempunyai seorang tokoh yaitu H. Oemar Said Tjokroaminoto. Beliau bergabung dengan Sarekat Islam di Surabaya dalam bulan Mei 1912 atas ajakan pendirinya Haji Samanhoedi. Sarekat Islam sudah mulai diperkenalkan di Gorontalo oleh Karel Panamo dan Jusuf Sabah, dan pada tahun 1923 Haji Oemar Said Tjokroaminoto mengunjungi Gorontalo untuk menggembleng kesadaran rakyat (ANRI). Pada prinsipnya

Sarekat Islam cepat diterima oleh masyarakat oleh karena masyarakat Gorontalo merupakan penduduk yang mayoritas beragama Islam.

Dalam usaha menyebarluaskan Sarekat Islam di Hindia Belanda H.O.S. Tjokroaminoto menyusun anggaran dasar baru dan meminta pengakuan dari pemerintah untuk menghindarkan diri atas pengawasan preventif dan represif secara administratif. Pemerintah kolonial Belanda dengan berbagai alasan menolak permintaan itu. Akan tetapi, permintaan dari organisasi-organisasi lokal yang mempunyai sifat yang sama akan dipertimbangkan (*Encyclopaedie van Nederlansch Indië III*. lihat pula, *Javasche Courant*, 15 Juli 1913).

Keputusan pemerintah kolonial Belanda itu sudah tentu mengganggu kemajuan kegiatan organisasi serta struktur organisasi. Sarikat Islam menurut kongres pertama di Surabaya bulan Januari 1913 menekankan kegiatan yang bersifat menyeluruh di Nusantara. Kongres ini membagi wilayah organisasi menjadi tiga bagian, yaitu Jawa Barat meliputi Jawa Barat, Sumatera, dan pulau-pulau di sekitar Sumatera; Jawa Tengah yang meliputi Kalimantan; dan Jawa Timur yang meliputi Sulawesi, Bali, Lombok, Sumbawa, dan pulau-pulau lain di Indonesia Timur. Ketiga wilayah itu serta cabang-cabang Sarekat Islam berada di bawah pengawasan dari pengurus pusat di Surakarta yang diketuai oleh Haji Samanhoedi.

Dari tiga departemen yang dibentuk, untuk Departemen Jawa Timur yang mewilayahi Gorontalo diketuai oleh HOS Tjokroaminoto. Untuk memenuhi persyaratan yang dikemukakan oleh pemerintah kolonial, organisasi ini mengusahakan adanya kerjasama yang erat antara satuan-satuan Sarekat Islam lokal. Dalam suatu pertemuan di Yogyakarta pada tanggal 18 Pebruari 1914 mereka memutuskan untuk membentuk pengurus pusat yang terdiri dari Haji Samanhoedi sebagai ketua kehormatan, Tjokroaminoto sebagai ketua dan Gunawan sebagai wakil ketua. Pengurus pusat Sarekat Islam diakui oleh pemerintah tanggal 18 Maret 1916 (Deliar Noer, 1988).

Pembagian wilayah organisasi seperti yang dikemukakan di atas memberikan kesempatan kepada Sarekat Islam lokal untuk melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh para simpatisan dan para anggota Sarekat Islam di Gorontalo untuk mempropagandakan ideologinya. Hal itu menimbulkan kecurigaan di kalangan penguasa kolonial sehingga terjadi pengawasan yang lebih ketat terutama kegiatan yang berbaur politik.

Ketika pada tahun 1921 Sarekat Islam berubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI), di Gorontalo diwarnai bentrokan dengan alat pemerintah kolonial. Bentrokan yang terjadi di Mesjid Jami' (kini Mesjid Agung Baiturrahim) pada tahun 1931 dan 1932, berpangkal dari pidato tokoh-tokoh

Sarekat Islam yang berbau politik yang dianggap bertentangan dengan larangan-larangan pemerintah kolonial yang telah ditentukan (ANRI). Pemerintah kolonial mencurigai setiap kegiatan yang berbau politik ini, karena dapat menimbulkan rasa benci terhadap pemerintah kolonial. Kemudian, pemerintah berusaha merongrong kegiatan-kegiatan yang berbau politik dengan mengeluarkan larangan-larangan.

Masyarakat Gorontalo berusaha mengantisipasi larangan-larangan itu dengan memberikan kesempatan kepada organisasi sosial budaya yang tumbuh di Jawa untuk berkembang di Gorontalo. Organisasi itu adalah Muhammadiyah, organisasi ini tidak dapat dipisahkan dalam pembicaraan tentang pertumbuhan nasionalisme di Indonesia umumnya dan Gorontalo khususnya. Muhammadiyah merupakan organisasi sosial Islam yang sangat penting yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan (1869–1923) pada November 1912 di Yogyakarta.

Kyai Haji Ahmad Dahlan berasal dari elite kesultanan Yogyakarta. Lahir pada tahun 1869 dengan nama Muhammad Darwis, anak Kyai Haji Abubakar bin Kyai Sulaiman, khatib di mesjid sultan di kota itu. Ibunya adalah anak Haji Ibrahim, seorang Penghulu. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya dalam bidang nahwu, fiqh, dan tafsir, ia pergi ke Mekkah pada tahun 1890 dan belajar selama setahun. Salah seorang gurunya adalah Syaikh Ahmad Khatib. Pada tahun 1909 ia memasuki Budi Utomo dengan harapan dapat berkhotbah tentang pembaharuan di kalangan para anggotanya, tetapi para pendukungnya mendesak agar mendirikan sebuah organisasi sendiri. Dengan demikian, berdirilah Muhammadiyah yang memusatkan perhatian pada usaha-usaha pendidikan dan dakwah. (Deliar Noer, 1988; George McTurnan Kahin, 1980).

Sejak awal tahun 1920-an dan seterusnya, organisasi ini menjadi kekuatan dominan di dalam Islam Indonesia yang terbesar dan paling mampu bertahan, jauh melampaui organisasi-organisasi agama dan politik lainnya.

Pada tahun 1923 Muhammadiyah memiliki 12 cabang di Jawa, tahun 1927, 176; tahun 1932, 463; tahun 1935, 809; tahun 1936, 851; dan tahun 1937, 913; lebih dari separuhnya terdapat di luar pulau Jawa (Harry J. Benda, 1980).

Muhammadiyah lebih banyak memilih aspek-aspek sosial didalam membangun semangat nasionalisme. Bersama-sama dengan Budi Utomo dan Taman Siswa yang juga bergerak dalam lapangan yang sama, Muhammadiyah menekuni kegiatannya kepada masyarakat dengan mengembangkan nasionalisme budaya dengan mendirikan sekolah-sekolah

sebagai tandingan ideologi kolonialisme yang diterapkan oleh pemerintah kolonial.

Organisasi Muhammadiyah, Budi Utomo, dan Taman Siswa merupakan gerakan nasionalisme yang memilih aspek sosial sebagai lapangan pengabdian dan perjuangannya. Tujuannya untuk memperjuangkan dan memperoleh satu ideologi, bebas dari kolonialisme (Sartono Kartodirdjo,1962).

Walaupun kegiatannya tidak bertumpu pada politik praktis, Muhammadiyah tampaknya tidak dapat mengabaikan atau bahkan terpaksa menanamkan kesadaran politik kepada anggota-anggotanya dan kepada murid-muridnya yang belajar di sekolah-sekolah yang didirikannya. Kahin mengungkapkan Muhammadiyah merupakan sebuah cawangan dari anak sungai nasionalisme politik yang tenang, tetapi dalam dengan secara senyap tetap memberikan kekuatan dan tenaga kepada alirannya (George McTurnan Kahin,1980). Dengan demikian, keheranan G.H Bousquet (1940) yang melihat pejabat-pejabat Belanda di Indonesia yang masih berpikir tentang gerakan-gerakan modernis Islam sebagai kurang berbahaya, dibandingkan dengan gerakan nasionalis yang menempatkan Islam bukan sebagai pokok, dapat dimengerti. Merujuk pada Muhammadiyah Bousquet berkata, memang betul bahwa Muhammadiyah tidak campur tangan dalam politik, tetapi anggota-anggotanya banyak terlibat. Lebih jauh Bousquet mengingatkan bahwa hukum-hukum administrasi tidak berdaya berhadapan dengan ajaran Islam, yang menanamkan kepercayaan kepada pengikutnya bahwa mereka punya status sejajar dengan pihak penguasa.

Hal tersebut diperkuat oleh pandangan Syafii Maarif (1987), bahwa kekurangcermatan aparat-aparat kolonial dalam membaca gerakan Muhammadiyah, ternyata menguntungkan. Keuntungan tersebut antara lain Muhammadiyah memiliki kesempatan yang baik untuk mengembangkan kegiatan sosial keagamaannya di seluruh Indonesia tanpa banyak mendapat rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, organisasi yang mulanya berjalan lambat dan terbatas hanya pada daerah Yogyakarta ini, sejak tahun 1920 meluas ke seluruh Jawa dan pada tahun 1921 menyebar ke seluruh Indonesia termasuk ke Gorontalo.

Organisasi Muhammadiyah mulai masuk ke Gorontalo, mula-mula diperkenalkan oleh Jusuf Otoluwa salah seorang siswa sekolah guru di Jakarta dan mengajak beberapa rekannya untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah setelah ia kembali ke Gorontalo (ANRI). Pada tanggal 18 November 1928 cabang Muhammadiyah di Gorontalo secara resmi ditetapkan

dan langsung dihadiri oleh Muhammad Junus Anis selaku sekretaris umum pusat Muhammadiyah (ANRI).

Dalam perkembangan selanjutnya Muhammadiyah cabang Gorontalo tidak saja mendirikan ranting-ranting di seluruh Gorontalo, akan tetapi juga meluas sampai ke Manado dan sekitarnya, bahkan sampai ke beberapa daerah Sulawesi Tengah (ANRI).

Sebagai organisasi sosial yang berlandaskan Islam, seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah di Gorontalo juga mendapat simpati dari masyarakat. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari citra Islam itu sendiri. Menurut Robert van Niel (1989), citra Islam-lah yang menjadi “besi berani” menarik anggota-anggota yang di dalam Islam sendiri terutama terdapat suatu harapan agar lebih mengeratkan hubungan dalam masyarakat dan ikatan persaudaraan. Dalam kerangka inilah maka Muhammadiyah mendapat simpati dari rakyat Gorontalo yang dikenal *fanatik* dengan Islam.

Muhammadiyah dalam kegiatannya melalui dakwah dan pendidikan telah mewujudkan program kerjanya dengan didirikannya sekolah-sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat lanjutan atas, mendirikan mesjid, musalla serta pusat-pusat kesehatan masyarakat dipelbagai ranting Muhammadiyah di wilayah Gorontalo. Semua hasil usaha kegiatan tersebut sampai kini telah dapat dinikmati dan terus dikembangkan.

Menurut salah satu sumber, kemajuan pesat Muhammadiyah ini menempatkan Muhammadiyah Gorontalo berhasil mengusahakan konferensi Muhammadiyah se-Sulawesi Utara yang diadakan di Suwawa Gorontalo pada tahun 1934 (ANRI).

Selain Muhammadiyah, terdapat juga organisasi Nahdatussyafiiyah yang cukup mendapat simpati pula dari masyarakat Gorontalo. Organisasi ini pada mulanya diperkenalkan oleh Salim Bin Djindan pada tahun 1935 dalam rangka menegakkan ajaran agama Islam melalui usaha pendidikan dan gerakan sosial (ANRI), walaupun tidak cukup banyak diketemukan sumber-sumber tentang organisasi ini, namun realitasnya Nahdatussyafiiyah berhasil mengembangkan organisasinya dengan membentuk ranting-ranting di kampung-kampung, serta mendirikan sekolah-sekolah diantaranya *Syafiiyah School* Ipilo, *Syafiiyah School* Potanga, *Syafiiyah Kweekschool* Gorontalo, *Madrasah Alwathaniyah* dan kursus *Azzakirah* Potanga (ANRI).

Organisasi berikutnya yakni *Jong Islamiten Bond* (JIB). Seperti halnya organisasi Sarekat Islam (SI), Muhammadiyah, dan Nahdatussyafiiyah, maka *Jong Islamiten Bond* juga mendasarkan basis ideologi gerakannya pada Islam. JIB dibentuk pada akhir tahun 1925 oleh orang-orang yang keluar dari *Jong Java* yang dimotori oleh Agus Salim. Pembentukan JIB ini merupakan

sebagian keprihatinan Agus Salim atas proses sekularisasi yang melanda *Jong Java*. Ketuanya R. Sam, bekas ketua *Jong Java* dan H. Agus Salim diangkat sebagai penasehat (John Ingleson, 1983; A.K.Pringgodigdo, 1964).

Terbentuknya JIB di Gorontalo tidak dapat dilepaskan dari tokoh-tokoh pelajar asal Gorontalo yang belajar di *Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA) Makasar. Ketika bulan Desember 1927 di Makasar JIB didirikan oleh murid-murid OSVIA, *Kweekschool* untuk pelaut pribumi, *Normaal School* dan HIS dengan tokohnya Nuruddin, seorang guru OSVIA Makasar (dalam laporan yang lain disebutkan bahwa JIB didirikan pada bulan Januari 1928, lihat *Mr. 832x/29: Politiek Verslag* 1928), maka gaung organisasi inipun dibawa oleh pelajar-pelajar OSVIA asal Gorontalo seperti Ismail Datau, Syam Biya, Abdullah Amu, dan Anyone Hadju ke Gorontalo. Dalam rapat pertama yang diadakan di gedung Murni (kini menjadi pertokoan) pada bulan Maret 1928 membentuk susunan pengurus JIB cabang Gorontalo dengan susunan pengurus: Djafar Arbie selaku ketua, Husain Laiya sebagai wakil ketua, Tjan Lamato sebagai sekretaris, Marie Mantu sebagai bendahara (ANRI).

Membangkitkan rasa kebangsaan yang meliputi masyarakat sebagai reaksi terhadap pemerintah kolonial Belanda yang telah menjauhkan agama dengan jiwa kebangsaan, merupakan salah satu sasaran perjuangan JIB Gorontalo. Selain itu juga diharapkan agar pemuda-pemuda yang mendapatkan pendidikan Belanda tidak menjauhkan dirinya dari masyarakat, sehingga dapat menjadi kader pemimpin masyarakat yang bertanggungjawab terhadap perjuangan bangsa.

Untuk menyebarkan missinya, pada bulan April 1928 JIB menerbitkan majalah triwulanan dengan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya. Majalah tersebut diberi nama *Suara Pemuda*. Redaksi dan administrasi dikelola oleh dua orang siswa OSVIA. Koran itu terutama memuat laporan tentang rapat anggota, debat, dan tulisan-tulisan yang berbau etis dan agama (Mr.883x/29). Selain itu juga JIB mendirikan *Jong Islamiten Bond Dames Afdeeling* (JIBDA) dan *Nationaal Indonesische Padvinderij* (NATIPIJ) (ANRI).

Di samping itu JIB juga membentuk organisasi baru yakni Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) cabang Gorontalo yang dipelopori oleh Drajat. Seperti organisasi lainnya yang tumbuh di Gorontalo, organisasi kepanduan juga merupakan bahagian alat perjuangan rakyat Gorontalo yang cukup strategis mengingat dalam setiap latihan-latihannya ditanamkan “semangat nasionalisme” sesuai dengan dasar perjuangannya. Selain itu untuk mengenang tokoh-tokoh pejuang pada masa Kerajaan Gorontalo masih

berjaya, organisasi ini menggunakan nama-nama tokoh tersebut dalam pembentukan regu seperti, regu *olabu*, regu *tamuu*, regu *panipi*, dan sebagainya.

Kegiatan organisasi kepanduan ini dipusatkan di Taman Putera (kini Jalan Merdeka). Menurut suatu sumber, tempat tersebut telah mengalami beberapa kali penggeledahan oleh pemerintah kolonial Belanda bahkan dokumen-dokumen penting disitanya oleh karenanya untuk mengelabui atau meniasiasi dari penggeledahan seringkali rapat-rapat diadakan pada malam hari tanpa memakai penerangan (lampu) (ANRI). Sartono Kartodirdjo(1990) berpendapat, bahwa nasionalisme sebagai suatu gejala historis telah berkembang sebagai jawaban terhadap kondisi politik, ekonomi, dan sosial khususnya, yang ditimbulkan oleh situasi kolonial. Kaum kolonialis menciptakan suatu diskriminasi dalam masyarakat, maka rakyat menjadi sadar akan ketidaksamaan hak-hak yang dimilikinya dan keadaan yang terjajah. Nasionalisme yang lahir, berkembang dan terwujud sebagai pergerakan nasional adalah suatu bentuk tanggapan terhadap kolonialisme.

Kesadaran rakyat Gorontalo akan posisinya tidak hanya diekspresikan dengan membentuk organisasi sosial, keagamaan, akan tetapi juga terwujud dalam kesadaran berpolitik. Hal ini tampak dengan terbentuknya organisasi politik yang lebih menganut ‘nasionalisme sekuler’, misalnya Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Soekarno dan kawan-kawan pada tahun 1927 di Bandung. Pada awal berdirinya, organisasi ini bernama Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) (M.C. Ricklefs,1955; Suhartono,1994). Orientasi dan tujuan dari partai ini bersifat anti kolonialisme dan non kooperatif. Oleh karena itu, membangkitkan kesadaran nasional adalah salah satu tugas utama PNI yakni dengan menginsyafkan rakyat akan besarnya penderitaan dalam menghadapi eksploitasi ekonomi, sosial dan politik oleh penguasa kolonial.

PNI cabang Gorontalo yang dipelopori Nani Wartabone dalam perkembangan selanjutnya tidak dapat berkembang dengan baik, namun demikian pada bulan September 1929 PNI berhasil mendirikan *Indonesische Nationale Padvinders Organisatie* (INPO), sebuah organisasi kepanduan yang bertujuan menumbuhkan semangat patriotisme dan nasionalisme di kalangan pemuda. (Harry A. Poeze, *Polotieke-Politioneele Overzichten van Nederland-Indië*, deel II, 1929-1930,Leiden:KITLV,1983). Akibat gerakannya yang bersifat radikal dan dukungan masyarakat luas maka pemerintah Hindia Belanda melakukan pengawasan yang ketat atas organisasi ini. Serangkaian peringatan kepada pimpinan PNI supaya menahan diri dalam ucapan dan propagandanya yang memuncak pada tersiarnya kabar bahwa PNI



akan mengadakan pemberontakan pada awal tahun 1930, maka pada tanggal 24 Desember 1929 pemerintah mengadakan penggeledahan dan penangkapan atas pimpinan PNI, seperti Ir. Soekarno, Maskun, Gatot Mangkupraja dan Supriadinata (George McTurnan Kahin,1980). Akibat semua ini segera dapat diduga bahwa para pimpinan PNI dijebloskan ke penjara yang sekaligus berakibat dibubarkannya partai ini pada tahun 1931. Akibat lebih jauh PNI cabang Gorontalo juga dibubarkan.

Setelah PNI dibubarkan atas inisiatif Mr. Sartono diadakanlah kongres untuk membicarakan pendirian partai baru. Partai baru tersebut adalah Partai Indonesia atau Partindo pada akhir April 1931 dan Sartono dipercaya untuk memimpinya (George McTurnan Kahin,1980). Untuk menyalurkan aktivitas politik dari bekas anggota-anggota PNI di Gorontalo, maka Nani Wartabone bersama dengan kawan-kawannya mendirikan cabang Partindo di Gorontalo. Partindo segera mendapat simpati di kalangan masyarakat. Dalam sebuah rapat umum di *Wedloop Societeit Gorontalo* (WSG) yang dihadiri oleh Mr. Ishak Cokrohadisuryo dan massa rakyat Gorontalo, Mr. Ishak dalam pidatonya mengatakan, betapa hinanya menjadi suatu bangsa yang terjajah serta bagaimana usaha-usaha untuk mengusirnya. Akibat yang ditimbulkan dari pidato itu, Mr. Ishak Cokrohadisuryo dan Nani Wartabone ditangkap, tetapi pada hari itu juga dibebaskan (ANRI).

Kehadiran organisasi baru ini rupanya juga bernasib sama dengan PNI, tidak mampu bertahan lama. Hal ini terkait dengan kemampuan Soekarno sebagai anggota Partindo yang luar biasa dalam menggalang massa yang menurut pemerintah sebagai sesuatu yang sangat berbahaya. Pada bulan Agustus 1933 Soekarno dan pemimpin lainnya ditangkap dan dibuang ke Flores, kemudian dipindahkan ke Bengkulu. (George McTurnan Kahin,1980).

Di Gorontalo walaupun kegiatan Partindo semakin meningkat, namun usaha Belanda untuk menghalangi kegiatan Nani Wartabone dengan jalan menawarkan gaji yang besar melalui keluarganya tidak berhasil karena ditolak oleh Nani Wartabone (ANRI). Hal ini terkait dengan prinsip non koperasi yang tetap dijalankan.

Sebagai akibat dilarangnya Partindo di pulau Jawa termasuk cabang-cabangnya yang berada diluar daerah serta penangkapan Soekarno sebagai pimpinan Partindo juga berakibat dengan dibubarkannya Partindo di Gorontalo. Hanya saja Nani Wartabone tidak kehabisan akal untuk tetap menanamkan jiwa nasionalisme kepada masyarakat. Nani Wartabone beserta kawan-kawannya melanjutkan perjuangannya melalui organisasi Muhammadiyah (ANRI).

Di samping organisasi Partindo, turut juga organisasi politik yang bertekad untuk mempersatukan kaum peranakan Arab-Indonesia dan organisasi ini diberi nama Partai Arab Indonesia (PAI). Partai Arab Indonesia (PAI) didirikan di kota Semarang pada tanggal 4 Oktober 1934 yang dipelopori oleh A.R. Baswedan. (George McTurnan Kahin,1980). Pada tahun 1937 PAI cabang Gorontalo didirikan atas prakarsa Abdullah Djibran, seorang pedagang yang sering melakukan perdagangan ke kota Makassar. Dalam aktivitasnya PAI berhasil mendirikan *Madrasah Alfatah* dan gerakan kepanduan *Hizbul Arab* Indonesia (ANRI). Selain aktif di PAI, tokoh-tokoh PAI Gorontalo juga aktif dalam organisasi Gabungan Politik Indonesia (GAPI).

GAPI didirikan pada bulan Mei 1939, merupakan federasi baru yang ingin menunjukkan hasrat persatuan partai-partai politik Indonesia yang menuntut untuk diadakannya “parlemen penuh di Indonesia” (M.C.Riclefs, 1955). Lima bulan setelah terbentuknya GAPI, maka pada bulan Oktober 1939 GAPI cabang Gorontalo juga terbentuk yang dipimpin oleh Rekso Sumitro (ANRI).

Sejak awal aksi “Indonesia berparlemen” dikhawatirkan oleh pemerintah Belanda, bahkan telah diberi peringatan oleh Gubernur Jenderal. Menurut Welter, sekarang perlu diberikan peringatan lagi dan suatu kebijaksanaan yang perlu diambil untuk mencegah perluasannya. Khususnya karena aksi tersebut tidak saja terbatas pada kalangan nasionalis tetapi juga di kalangan klub pegawai negeri yang ikut serta didalamnya. Welter juga mengatakan bahwa aksi “Indonesia berparlemen” ini hanya akan menemui kekecewaan, jadi mulai sekarang perlu dibatasi. Dikatakan selanjutnya oleh Welter dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal bahwa ia menyetujui seluruh penolakan aksi tersebut oleh Gubernur Jenderal dan terhadap usul Soetardjo untuk mengadakan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap parlemen penuh. Setiap pengurangan kekuasaan pemerintah pusat (Gubernur Jenderal) dalam keadaan Internasional sekarang akan merugikan kepentingan kerajaan. Lebih tegas lagi menurut Welter, akan sesuai dengan keadaan di mana-mana berhubung dengan zaman perang. Kemungkinan untuk memenuhi sedikit tuntutan nasionalis dilihat oleh Welter dalam mengembangkan dewan-dewan rakyat daerah (yang sama sekali tidak dihiraukan oleh golongan nasionalis) dengan mengangkat beberapa “kaula Belanda” (orang Indonesia) dalam *Raad van State* di negeri Belanda (S.L. Van Der Wal, *De Volksraad en de Staatkundige Ontwikkeling van Nederlandsch-Indië, een Bronnen Publikatie, Tweede Stuk 1927-1942*. J.B. Wolters,1963).

Dari uraian diatas dapat dimengerti bahwa Gubernur Jenderal dan pemerintahnya menyetujui surat menteri jajahan Welter tersebut dalam arti aksi “Indonesia berparlemen” harus dibatasi dan ditolak, walaupun begitu GAPI sendiri biarpun diperingatkan beberapa kali tetap meneruskan aksinya. Hal inipun sangat dirasakan pula oleh kaum nasionalis Gorontalo yang tergabung dalam organisasi GAPI.

Ketika rapat umum pertama diadakan di gedung bioskop Murni (kini menjadi pertokoan), dalam kesempatan itu Koesno Danoepojo memberikan kata sambutan antara lain mengatakan, “Saudara-saudara peserta rapat, saya harap jangan merasa berkecil hati atas jawaban paduka yang mulia Welter yang mengatakan bahwa, Indonesia belum matang untuk berparlemen. Mungkin paduka yang mulia Welter dalam keadaan melamun sehingga bangsa Indonesia belum matang berparlemen”. Akibat yang tidak dapat dihindarkan dari apa yang diucapkan Koesno Danoepojo, terjadi insiden pembubaran rapat oleh polisi Couper yang pada saat itu sedang mengawasi jalannya rapat (ANRI).

Dalam perkembangan selanjutnya, untuk mempopulerkan ide-idenya aksi GAPI dilakukan secara hati-hati karena peringatan-peringatan pemerintah. Sering tokoh GAPI berjanji pada penasehat-penasehat pemerintah untuk tidak meluaskan aksinya atau tidak mengkongkritkan apa yang dibicarakan dan diterima dalam rapat demi penyelamatan diri. Di dalam rapat maupun kongres mungkin kelihatan bahwa tekad bulat sesuatu yang hebat, tetapi dalam prakteknya hal ini sering berlainan dan tingkah laku harus disesuaikan dengan keadaan represif pemerintah kolonial. Tetapi dalam tulisan pers dan pidato-pidato aksi-aksi tersebut dilakukan secara hebat dan bergelora. Kelemahan dari gerakan ini mungkin terletak pada kurangnya dukungan finansial yang cukup, adanya represi pemerintah dan lain-lain (S.L. Van Der Wal, *De Volksraad en de Staatkundige Ontwikkeling van Nederlandsch-Indië, een Bronnen Publikatie, Tweede Stuk 1927-1942*. J.B. Wolters, 1963).

Aksi lain yang dilancarkan dalam masyarakat tetapi tidak tergabung dalam GAPI adalah aksi yang dipelopori oleh Haji Agus Salim dengan “*barisan penyedar*”-nya. Gerakan ini ditujukan pada pendewasaan masyarakat dan tidak pada tujuan politik dalam arti kata sempit. Haji Agus Salim merupakan tokoh pergerakan dari kalangan Islam yang sangat independen dalam aksi dan pikirannya (S.L. Van Der Wal, *De Volksraad en de Staatkundige Ontwikkeling van Nederlandsch-Indië, een Bronnen Publikatie, Tweede Stuk 1927-1942*. J.B. Wolters, 1963). Gerakan *penyedar* ini pun akhirnya masuk ke daerah Gorontalo.

Sebagaimana halnya di Jawa, menjelang perang dunia kedua organisasi politik maupun organisasi sosial lainnya di Gorontalo mengikuti situasi yang berkembang di negeri Belanda maupun di Hindia Belanda sendiri.

### 1. Munculnya Pers di Gorontalo

Munculnya nasionalisme sebagai respon rakyat Gorontalo terhadap hegemoni Belanda yang terwujud dalam kesadaran nasional secara intensif tidak dapat dilepaskan dari peran serta pers dalam kancah perjuangan. Dinamika pergerakan yang tumbuh dan berkembang sejalan dengan pers menjadikan pers sebagai salah satu instrumen penting sebagai “corong nasionalisme” juga bermunculan.

Adapun fungsi yang diemban oleh pers salah satunya adalah mensosialisasikan cita-cita dan perjuangan pergerakan kepada rakyat. Hal tersebut penting mengingat pers sifatnya kontinyu dan intensif sehingga penanaman kesadaran terhadap rakyat dapat lebih efektif, walaupun tentunya tidak dapat dipungkiri adanya segmentasi menurut aliran dan kepentingan politik masing-masing pergerakan atau kelompok tertentu.

Istilah pers diterjemahkan dari bahasa Inggris *press*, mempunyai pengertian luas dan sempit. Dalam pengertian luas, pers mencakup semua media komunikasi massa seperti, radio, televisi dan film yang berfungsi menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran atau perasaan seseorang atau kelompok orang kepada orang lain. Pers dalam pengertian hanya digolongkan pada produk-produk penerbitan yang melewati proses percetakan seperti, surat kabar harian, majalah mingguan dan sebagainya atau dikenal sebagai media cetak. Pers yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pers dalam pengertian sempit. (F. Rachmadi, 1990; B.N. Marbun, 1986).

Seperti halnya di daerah-daerah lain di Indonesia, pers yang hadir di Gorontalo pada dasawarsa kedua abad ke-20 menurut sumber diketahui lebih kurang terdapat dua belas surat kabar pribumi yang pernah terbit di Gorontalo sampai masuknya pendudukan Jepang. Surat kabar tersebut adalah *Soeara Nasional*, *Tjahaja Merdeka*, *Sinar Merdeka*, *Soeara Rakjat*, *Kilat*, *Kesatoean*, *Soeara Pemoeda*, *Lukisan Masjarakat*, *Kebenaran*, *Kita*, *Adil* dan *Insjaf*. Untuk mendapatkan gambaran tentang surat-surat kabar pribumi tersebut, berikut ini profil singkat masing-masing surat kabar tersebut yang dikutip dari K.P.R.I. (1953) (ANRI).

#### 1. *Soeara Nasional* (terbit tahun 1938)

Pemimpin Redaksi : Is. Datau  
Tujuan : Umum/Republikein  
Penerbitan : Harian (dicetak)

- Oplaag* : tidak ada keterangan  
 Langganan : tidak ada keterangan  
 Alamat : Jalan Eyato
2. ***Tjahaja Merdeka*** (terbit tahun 1940)  
 Pemimpin Redaksi : A. R. Onge  
 Tujuan : Umum/Republikein  
 Penerbitan : Mingguan (dicetak)  
*Oplaag* : 500 Eksemplar  
 Langganan : fl. 2.5,- sebulan  
 Alamat : Jalan Wartabone
3. ***Sinar Merdeka*** (terbit tahun 1940)  
 Pemimpin Redaksi : Is. Datau  
 Tujuan : Kebangsaan  
 Penerbitan : Mingguan (dicetak)  
*Oplaag* : tidak ada keterangan  
 Langganan : tidak ada keterangan  
 Alamat : tidak ada keterangan
4. ***Soeara Rakjat*** (terbit tahun 1938)  
 Pemimpin Redaksi : Usman Monoarfa  
 Tujuan : Umum/Republikein  
 Penerbitan : Tengah bulanan (dicetak)  
*Oplaag* : tidak ada keterangan  
 Langganan : fl. 3,- sebulan  
 Alamat : Jalan Tanggidaa Gorontalo
5. ***Kilat*** (terbit tahun 1938)  
 Pemimpin Redaksi : A. Tumu  
 Tujuan : Umum/Republikein  
 Penerbitan : Mingguan (dicetak)  
*Oplaag* : tidak ada keterangan  
 Langganan : fl. 3,- sebulan  
 Alamat : tidak ada keterangan

6. ***Kesatoean*** (terbit tahun 1939)
  - Pemimpin Redaksi : Sjarifuddin
  - Tujuan : Umum/Republikein
  - Penerbitan : Mingguan (dicetak)
  - Oplaag* : 1500 eksemplar
  - Langganan : fl. 3,- sebulan
  - Alamat : tidak ada keterangan
  
7. ***Soeara Pemoeda*** (terbit tahun 1938)
  - Pemimpin Redaksi : M.S.Ointu
  - Tujuan : Pemuda/Republikein
  - Penerbitan : Mingguan (dicetak)
  - Oplaag* : tidak ada keterangan
  - Langganan : fl. 3.5,- sebulan
  - Alamat : Jalan Drukkerij Gorontalo
  
8. ***Lukisan Masjarakat*** (terbit tahun 1940)
  - Pemimpin Redaksi : S.Musa
  - Tujuan : Umum/Republikein
  - Penerbitan : Madjalah Bulanan (dicetak)
  - Oplaag* : tidak ada keterangan
  - Langganan : tidak ada keterangan
  - Alamat : Jalan Limboto
  
9. ***Kebenaran*** (terbit tahun 1940)
  - Pemimpin Redaksi : M. Amin Larekeng
  - Tujuan : Republikein ke arah Indonesia Merdeka
  - Penerbitan : Mingguan (dicetak)
  - Oplaag* : 1000 eksemplar
  - Langganan : fl. 3,- sebulan
  - Alamat : Jalan Tanggidaa Gorontalo
  
10. ***Kita*** (terbit tahun 1941)
  - Pemimpin Redaksi : R. Sjuuib
  - Tujuan : Umum/Republikein
  - Penerbitan : Mingguan (dicetak)
  - Oplaag* : tidak ada keterangan
  - Langganan : tidak ada keterangan
  - Alamat : tidak ada keterangan

11. *Adil* (terbit tahun 1942)

Pemimpin Redaksi : M.Imran  
Tujuan : Republikein/Umum  
Penerbitan : Tengah bulanan  
*Oplaag* : tidak ada keterangan  
Langganan : tidak ada keterangan  
Alamat : Jalan Limba B Gorontalo

12. *Insjaf* (terbit tahun 1942)

Pemimpin Redaksi : M. Imran  
Tujuan : Umum/Republikein  
Penerbitan : Tengah bulanan  
*Oplaag* : tidak ada keterangan  
Langganan : tidak ada keterangan  
Alamat : Jalan Limba B Gorontalo

Selain surat-surat kabar yang telah disebutkan diatas, bermunculan pula surat-surat kabar yang diterbitkan oleh orang-orang Tionghoa peranakan (Leo Suryadinata, 1988;ANRI). Surat-surat kabar tersebut adalah *Chau Sing*, *Njaring*, dan *Sin Hwa Po* yang terbit di Makasar namun peredarannya sampai di Gorontalo. Surat-surat kabar Tionghoa Indonesia baru muncul pada abad ke-20 yang dapat dibagi menjadi pers berbahasa Melayu (setelah 1928, berbahasa Indonesia) dan berbahasa Tionghoa, yang pertama dikelola oleh orang Tionghoa peranakan yang kedua oleh orang-orang Tionghoa totok.

*Chau Sing* terbit sekali dalam setahun dan diterbitkan pertama kali pada tahun 1925. Surat kabar ini terbit dua kali seminggu (Rabu dan Sabtu) dengan redaktur Jo Song Tie dan administrator T.L. Gann. Koran yang beralamat di *Grootestraat 72* Makassar ini di sebarakan ke berbagai daerah lainnya seperti, Surabaya, Manado, Balikpapan, Pamekasan, Ternate, Pasuruan, Gorontalo, dan Semarang. Surat kabar kedua *Njaring*, edisi pertama terbit pada tahun 1928 dengan redaksi Ten Tjong Hoe sebelumnya bernama *Soeara Siauw Lion* beralamat di *Matjiniawogeg* no. 61 (kini jalan buruh) terbit dua kali seminggu. Sedangkan surat kabar yang ketiga adalah *Sin Hwa Po* dengan alamat redaksi *Passerstraat* no. 83. Koran ini terbit setiap hari kecuali Minggu dan Hari Raya (ANRI).

Banyaknya surat kabar, khususnya surat kabar pribumi yang pernah terbit di Gorontalo tidak hanya memainkan peranan penting dalam pertumbuhan dan pengembangan nasionalisme, akan tetapi juga telah menciptakan suatu masyarakat yang edukatif. Ditambahkan pula, pers telah menciptakan sistem komunikasi terbuka yang karenanya informasi dapat

diperoleh golongan sosial mana pun. Sirkulasi informasi yang terbuka mau tidak mau mengurangi keketatan hirarkhi menurut usia dan kedudukan, posisi monopolistis golongan yang berstatus tinggi dan sebagainya (Sartono Kartodirdjo,1985;Takashi Shiraisi, 1990; Abdurrahman Surjomihardjo,1993).

Disamping itu pula bahwa terbitan pers dapat dianggap sebagai pedoman dalam suatu negeri, sebagai terompet untuk kemajuan rakyat, cermin dari lahirnya gagasan pada masanya, dan bukti tumbuh serta berkembangnya pemikiran-pemikiran sesuai dengan kemajuan rakyat. Pers juga menjadi jembatan untuk mengadakan hubungan antara semua pembaca dan penduduk. Dengan demikian antara pergerakan nasional dan pertumbuhan pers sebagai respons atas kuasanya pemerintah Belanda mempunyai korelasi yang signifikan.

### **Munculnya Gerakan Sastra Gorontalo**

Nasionalisme tumbuh bertahap dan didukung oleh bentuk kegiatan yang tidak semata-mata dalam wadah organisasi politik ataupun organisasi sosial. Akan tetapi di lapangan yang lain, seperti di bidang kesusasteraan juga terdapat kebangunan penduduk bumiputra di Hindia Belanda. Kaum bumiputra mencari tempat dan bentuk-bentuk untuk menyatakan kesadaran baru, menggerakkan pikiran-pikiran dan gagasan yang dihadapkan kepada realitas di Hindia Belanda di tengah-tengah dunia dan zaman yang dirasakan semakin bergerak (Sartono Kartodirdjo,1985;Takashi Shiraisi, 1990; Abdurrahman Surjomihardjo,1993).

Karya-karya sastra sebagai bentuk ekspresi pada zamannya amat penting untuk diperhitungkan dalam membentuk kesadaran dan mampu memberikan motivasi kuat bagi rakyat dan bangsanya. Selain itu, karya-karya sastra yang bermutu tinggi akan menjadikan bangsanya termasyhur serta menjadikan bangsa itu jaya (pandangan Muhammad Jamin dalam Deliar Noer, “Jamin dan Hamka, Dua Jalan Menuju Identitas Indonesia”, dalam Anthony Reid & David Marr, (ed.), *Dari Raja Ali Haji Hingga Hamka: Indonesia dan Masa Lalunya*,1983). Banyak hal yang bisa dikaji dengan menelaah perspektif-perspektif suatu bangsa melalui gagasan-gagasan yang terdapat dalam karya sastra.

Di Gorontalo kesusasteraan juga mempunyai peran penting bagi perjuangan rakyat di dalam merebut kemerdekaan dari tangan kolonialis, terutama dalam membangkitkan rasa nasionalisme. Secara fungsional peranan kesusasteraan pada masa itu tidak jauh berbeda dengan peranan pers. Kesusasteraan yang dimaksudkan disini adalah karya sastra daerah dalam bentuk tradisi lisan atau sastra lisan yang disebut *tanggomo*.



Dalam kehidupan sastra lisan Gorontalo, ragam *tanggomo* masih dapat bertahan bahkan berkembang dalam berbagai variasi pada penceritaan tukang cerita. Ragam ini meliputi cerita-cerita yang sudah lama dan yang baru. *Tanggomo* adalah ragam sastra lisan di Gorontalo yang diciptakan oleh pencerita (tukang *tanggomo*) berdasarkan peristiwa atau kejadian yang nyata atau yang dianggap nyata dalam bahasa yang indah. *Tanggomo* menampung semua peristiwa itu, kemudian oleh tukang *tanggomo* disebarkan sebagai berita yang dapat dinikmati dan bermanfaat bagi pendengar. Dalam hal ini *tanggomo* adalah sumber berita lisan dan dokumen lisan bagi masyarakat Gorontalo, sedangkan tukang *tanggomo* adalah penyair, wartawan dan dokumentator lisan (Nani Tuloli,1990). Tokoh penyair legendaris *tanggomo* Gorontalo adalah Temey Manuli (ANRI).

Sebagai penyair tradisional Gorontalo, Manuli telah mampu memberikan energi baru di tengah perkembangan pers dan perjuangan kebangsaan rakyat Gorontalo pada masa itu. Dalam kesederhanaan dan kesehajaan yang terbersit di dalam kehidupan sehari-harinya, Manuli dengan kemampuannya memberikan sesuatu yang amat berharga bagi terbentuknya nilai-nilai lokal (*local wisdom*) nasionalisme Gorontalo menjadi *counter* terhadap sistem kolonial yang diterapkan secara agresif. (sudah selayaknya tokoh ini diberikan apresiasi atas jasa-jasa semasa hidupnya).

Dalam kapasitas tersebut *tanggomo* menjadi *counter* terhadap sistem kolonial yang diterapkan di tanah jajahan, Gorontalo. Pemanfaatan *tanggomo* sebagai media informasi oleh semua lapisan masyarakat merupakan salah satu bukti terjadinya penyebaran gagasan atau ide-ide pembaharuan, mengingat dalam *tanggomo* terdapat nilai-nilai dan fungsi bagi kehidupan masyarakat.

Nilai-nilai dan fungsi *tanggomo* bagi kehidupan masyarakat Gorontalo diantaranya adalah, tercermin nilai historis yaitu peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi. Nilai heroik adalah berbagai segi yang menyangkut kepahlawanan, keberanian, kemampuan, kegagahan tokoh dalam menghadapi berbagai tantangan untuk mencapai cita-cita. Fungsi yang lain, ialah pelestarian peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu, *tanggomo* mempunyai nilai didik, seperti timbulnya perasaan kepeloporan, kebangsaan, tanggung jawab, rasa sosial dan solidaritas, nilai moral dan keagamaan (Nani Tuloli,1990). Dari nilai-nilai dan fungsi *tanggomo* inilah rakyat Gorontalo rasa nasionalisme semakin terinternalisasi. Nasionalisme dalam konteks kolonial berfungsi sebagai *counter ideologi* kolonialisme (Sartono Kartodirdjo,1993).

Walaupun tidak ada keterangan yang pasti tentang kapan *tanggomo* pertama kali muncul di daerah ini. Dari sumber yang ada bahwa *tanggomo* sudah ada sejak masa-masa kerajaan Gorontalo, yang digolongkan sebagai puisi adat dan puisi filsafat. Puisi adat dan puisi filsafat ini bersumber dari ide dan pandangan hidup masyarakat. Fungsinya terutama untuk mengesahkan dan memberi nilai serta nasehat (Nani Tuloli, 1990).

Bertahan dan berkembangnya *tanggomo* dapat dikembalikan pada adanya nilai-nilai dan fungsi itu bagi kehidupan masyarakat. Tukang *tanggomo* telah memadukan kenyataan dengan fantasi dan imajinasinya, sehingga nilainya menjadi lebih tinggi. Seperti yang juga dikatakan Muhammad Jamin bahwa, karya-karya sastra yang bermutu tinggi akan menjadikan bangsanya termasyhur dan menjadikan bangsa itu jaya (Deliar Noer dalam Anthony Reid & David Marr).

Dalam perkembangan selanjutnya, penyampaian *tanggomo* atau penceritaan *tanggomo* selain penceritaan tanpa memakai alat musik juga penceritaan dengan memakai alat musik seperti gambus, kecapi, atau rebana. Fungsi dari alat-alat musik ini untuk mengi-ringi dan memperindah penceritaan, mendorong dan merangsang timbulnya daya cipta pencerita pada saat bercerita.

Dalam penyajian tukang *tanggomo* telah menggunakan sebaik-baiknya daya ciptanya, daya pikir dan ingatannya, perasaannya, juga kemahiran menggunakan alat musik, suara dan anggota badannya. Perpaduan yang harmonis penggunaan sarana tersebut menghasilkan penampilan atau penceritaan yang menarik, memukau, bermakna dan hidup bagi penonton (Nani Tuloli, 1990).

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, penceritaan *tanggomo* yang didasarkan peristiwa nyata atau dianggap nyata pada akhirnya menghasilkan cerita dan informasi yang bervariasi, oleh karena disampaikan oleh kepelbagaian pencerita yang berbeda, namun ini diduga kuat lebih banyak dipengaruhi oleh sumber penceritaan pada masa dan periode tertentu, sehingga secara fungsional dan makna *tanggomo* pada masa periode tertentu juga berbeda.

Digemarinya *tanggomo* oleh semua golongan dan lapisan masyarakat menunjukkan di Gorontalo adanya pemerataan informasi secara terbuka tanpa mengenal adanya status dan kedudukan seseorang, dengan demikian *tanggomo* telah memberikan jawaban kepada kaum kolonialis atas diskriminasi yang diciptakan dalam masyarakat.

## **Simpulan**

Berdasarkan analisis dan rekonstruksi historiografi ini, dapat disimpulkan bahwa tumbuh dan berkembangnya gagasan nasionalisme rakyat Gorontalo pada dasarnya merupakan wujud dari kebangunan kesadaran nasional, yakni suatu kesadaran yang tumbuh dari situasi dan kondisi sebagai bangsa yang terjajah. Nasionalisme yang diwujudkan dalam bentuk organisasi pergerakan, baik yang bervisi lokal seperti *Hulunga*, Sinar Budi, *Jong Gorontalo* maupun organisasi yang bersifat nasional yang tumbuh dan berkembang serta menyebar di wilayah Nusantara seperti, Serikat Islam (SI), Muhammadiyah, Nahdatussyafiiyah, *Jong Islamiten Bond* (JIB) serta organisasi politik seperti, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Indonesia (Partindo), Partai Arab Indonesia (PAI), Partai Tionghoa Indonesia (PTI) dan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) bahkan munculnya beberapa surat kabar dan gerakan kesusasteraan daerah seperti *tanggomo* semua itu merupakan respons rakyat atas hegemoni Belanda. Keterlibatan kaum intelektual dalam menumbuhkan nasionalisme menjadi kunci sebagai penggerak utama dari berbagai organisasi pergerakan tersebut, yang pada akhirnya menjadi sebuah pukulan “dahsyat” bagi pemerintah kolonial Belanda.

#### **Daftar Pustaka**

- A. L. Massa, *Mengenang Peristiwa 23 Januari 1942 di Gorontalo*. Gorontalo: t.p., 2000.
- Brugmans, I.J., *et al.*, *Nederlandsch-Indië Onder Japanese Bezetting, Gegevens en Document Over de Jaren 1942-1945*. Groningen: Franeker, 1960.
- Djoened Poesponegoro, Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Gongrijp, G.F.E., “Gorontalo” dalam *Koloniaal Tijdschrift II*, tahun 1915.
- Haga, B.J., “De Lima Pohalaa (Gorontalo), Volksordening, Adatrecht en Bestuur Politiek” dalam *TITLV* deel LXXI, 1931.
- Inventaris Arsip Gorontalo*. Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 1976.
- F. Rahmadi, *Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*. Jakarta: Gramedia, 1990.
- Jr., Berkhofer, Robert F., *A Behavioral Approach to Historical Analysis*. New York: The Free Press, 1971.
- Keller, Suzanne, *Penguasa dan Kelompok Elit Penentu Dalam Masyarakat Modern*, (terjemahan Zahara D. Noer). Jakarta: Rajawali Press, 1984.

- Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Propinsi Sulawesi*. Makassar: Djawatan Penerangan R. I., 1953.
- Manus, dkk., *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Utara*. Manado: P3KD, 1978/1979.
- Morrison, G.G., *History of United States Naval Operations in World War*. Jilid II. Little Brown & CO., 1947.
- Nani Tuloli, *Tanggomo: Salah Satu Ragam Sastra Lisan Gorontalo*. Disertasi Doktor tidak diterbitkan pada Universitas Indonesia Jakarta, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Tanggomo: Salah Satu Ragam Sastra Lisan Gorontalo*. Ringkasan disertasi untuk memperoleh gelar doktor tidak diterbitkan pada Universitas Indonesia Jakarta, 1990.
- Onghokham, *Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta: PT. Gramedia, 1987.
- Pembangoen*, 16 Maret 1942. Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Pandji Poestaka*, No. 2, 18 April 1942. Koleksi Perpustakaan Nasional Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, No. 23, 12 September 1942. Koleksi Perpustakaan Nasional Indonesia, Jakarta.
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern*, (terjemahan Dharmono Hardjowidjono). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1955.
- Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa dan Kelanjutannya, Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*, Jilid II. Jakarta: PT. Gramedia 1990.
- \_\_\_\_\_, *Elite Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: LP3ES, 1981.
- \_\_\_\_\_, "Struktur Sosial dalam Masyarakat Tradisional", dalam *Lembaran Sejarah*, No.4. Yogyakarta : Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, 1969.
- \_\_\_\_\_, "Some Problems on The Genesis of Nationalism in Indonesia", dalam *Journal Southeast Asian History*, Vol. 3, No. 1., March 1962.

- \_\_\_\_\_, *Beberapa Masalah Teori dan Metodologi Sejarah Indonesia*. Yogyakarta : Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.
- \_\_\_\_\_, “Nasionalisme, Lampau dan Kini” makalah disampaikan dalam seminar tentang *Nasionalisme Indonesia*, diselenggarakan UKSW Salatiga, 1993.
- Shiraishi, Takashi, *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java*. Ithaca and London: Cornell University Press, 1990.
- Van den Bosch, Amry, *The Dutch East Indiës: its Government, Politics, and Problems*. Berkeley: University Press, 1941.
- Van Niel, Robert, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, (terjemahan Zahara Deliar Noer). Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- Van Mook, H.J., *The Netherlands Indiës and Japan: Their Relations 1940-1941*. London: George & Unwin Ltd., 1944.